

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Sampah menjadi salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampah kini sudah menjadi permasalahan sosial, bukan lagi sekadar permasalahan lingkungan yang bahkan berpotensi terjadinya konflik (Damanhuri, 2010). Permasalahan sampah sudah menjadi agenda besar dunia dalam rangka menjaga kestabilan lingkungan di masa yang akan datang. Upaya nyata untuk menjaga kestabilan lingkungan dapat dilakukan melalui penerapan konsep pengembangan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan konsep pembangunan dengan menjaga tingkat kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta keadilan yang dapat menjadikan kualitas hidup antar generasi menjadi meningkat secara berkelanjutan.

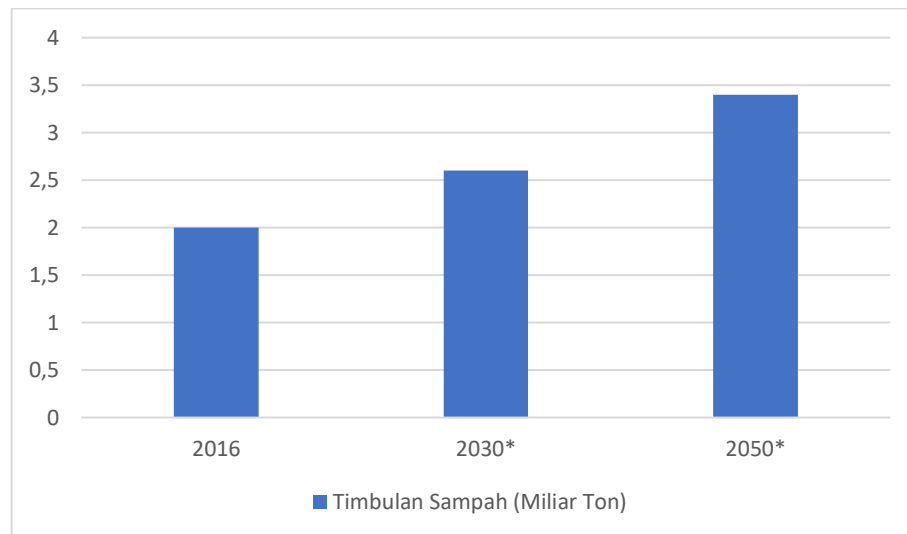
Permasalahan lingkungan termuat dalam target SDG's ke-12 yakni pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan yakni dengan penanganan limbah industri dan rumah tangga melalui program kegiatan mengelola sampah, limbah B3 atau bahan berbahaya beracun, mengendalikan kerusakan dan pencemaran. Strategi penanganan limbah industri dan rumah tangga pada SDG's dilakukan oleh negara-negara di dunia karena menjadi salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah, terutama di wilayah perkotaan. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya perlu ada campur tangan berbagai pihak, termasuk pemerintah agar dapat menyelaraskan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh

lingkungan. Hal tersebut karena lembaga pemerintah dituntut untuk dapat berperan dalam menampung seluruh kebutuhan demokrasi suatu negara (Irawan, 2017) termasuk kondisi bersih dan sehat pada lingkungan tempat tinggal.

Definisi sampah menurut World Health Organization (WHO) ialah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, tidak digunakan, atau segala sesuatu yang dibuang karena aktivitas manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, sampah merupakan sisa dari proses alam dengan wujud padat atau sisa perbuatan yang dihasilkan manusia sehari-hari. Timbulan sampah dihasilkan dari berbagai jenis sumber sampah, mulai dari wilayah perumahan, perkantoran, komersil, industri, pertanian, dan sebagainya yang berada pada satu wilayah tertentu dengan kurun waktu tertentu (Dewilda *et.al*, 2013). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin beragam pula aktivitas manusia, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah dan variasi sampah (Christina *et.al*, 2015).

Menurut laporan data Bank Dunia, secara global masyarakat menghasilkan sebanyak 2,01 miliar ton limbah pada tahun 2016. Hal ini diprediksi akan terjadi peningkatan pada tahun 2030 hingga mencapai 2,59 miliar ton dan 3,4 miliar ton pada tahun 2050.

Gambar 1. 1 Limbah Sampah Secara Global



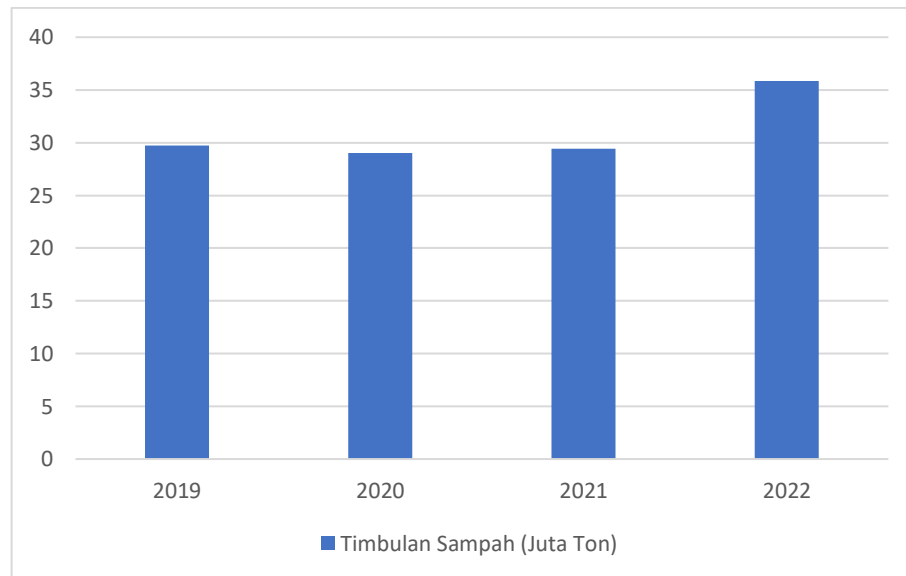
Sumber: Bank Dunia (dalam katadata.co.id, 2020)

Berdasarkan data *The Economics Intelligence Unit*, Indonesia berada pada urutan kedua di dunia sebagai negara penghasil sampah makanan pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suhardi Duka selaku anggota Komisi IV DPR RI yang menjelaskan bahwa volume sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton pada tahun 2021 naik menjadi 70 juta ton pada tahun 2022. Terdapat sekitar 16 juta ton sampah atau 24% sampah di Indonesia yang belum dikelola hingga saat ini oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Volume timbulan sampah tersebut naik 21,7% dibanding 2021, sekaligus menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hal ini menjadikan

Indonesia sebagai negara pemasok sampah terutama jenis sampah plastik terbesar nomor dua di dunia setelah China.

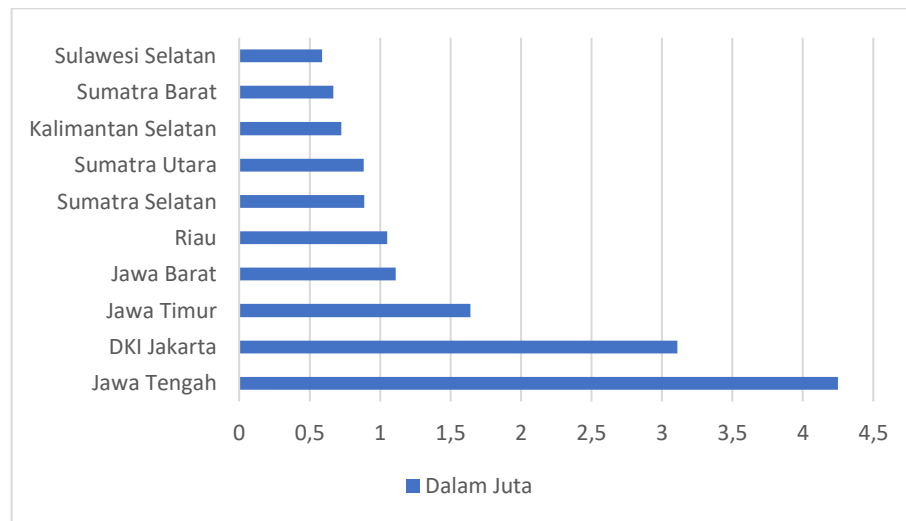
Gambar 1. 2 Volume Timbulan Sampah Nasional (2019-2022)



Sumber: KLHK (dalam data.indonesia.id, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tercatat Jawa Tengah termasuk ke dalam provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia, yakni sekitar 32.032.400 ribu jiwa pada tahun 2022. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan sampah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin beragam pula aktivitas manusia, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah dan variasi sampah (Christina *et.al*, 2015).

Gambar 1. 3 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia (2023)



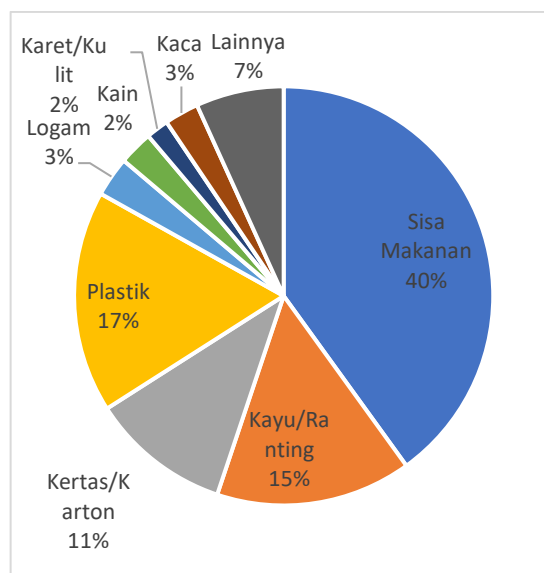
Sumber: katadata.co.id (2023)

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah sampah terbanyak di Indonesia pada tahun 2022 yakni mencapai 4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional tahun lalu. Hal tersebut melebihi Jakarta selaku Ibukota yang berada di peringkat kedua dengan timbulan sampah sebanyak 3,11 juta ton. Kota Semarang merupakan kota terbesar di Jawa Tengah karena Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang mana hal tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan. Disamping sebagai pusat pemerintahan, Kota Semarang juga menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan bisnis. Hal ini mengakibatkan Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah penduduk terpadat di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya jumlah penduduk Kota Semarang memberikan pengaruh pada jumlah sampah yang dihasilkan.

Bambang Suranggono selaku Kepala DLH Kota Semarang mengatakan bahwa produksi sampah Kota Semarang kembali meningkat. Rata-rata sampah

yang dibuang ke TPA mencapai 1.110-1.150 ton perharinya. Jumlah sampah yang telah terkumpul selanjutnya dibuang ke TPA Jatibarang. Pada tahun 2022, kondisi TPA Jatibarang mengalami kelebihan kapasitas muatan karena TPA Jatibarang sendiri hanya mampu menampung sekitar 60.000 ton sampah. Saat ini, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 900 ton per hari. Besarnya sampah yang dibuang ke TPA menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah (Coskun, 2020).

Gambar 1. 4 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah (2022)



Sumber: SIPSN (2022)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingginya produksi sampah berdasarkan jenis sampah di Kota Semarang didominasi oleh sampah sisa makanan yakni sebesar 40%. Untuk mengurangi timbulan sampah, pemerintah Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang berupaya meminimalisir timbulan sampah dengan menerapkan program 3R “*Reduce, Reuse, Recycle*” dengan memaksimalkan

keberadaan bank sampah. Bambang Suranggono selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang berupaya untuk terus mengencangkan program penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat program pilah sampah oleh bank sampah. Program bank sampah menjadi strategi menerapkan 3R pengelolaan sampah tingkat masyarakat dengan cara menukar sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung. Dalam program ini, masyarakat diberikan edukasi terkait pemilihan sampah berdasarkan jenisnya.

Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuannya sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Peran atau partisipasi masyarakat di Kota Semarang dalam hal pengelolaan sampah termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam permasalahan sampah.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat diwujudkan melalui kegiatan bank sampah. Saat ini, tercatat sebanyak 167 bank sampah yang tersebar di berbagai kelurahan Kota Semarang. DLH Sendiri telah menargetkan dapat menambah hingga mencapai 1.000 bank

sampah di Kota Semarang. DLH Kota Semarang telah memiliki 40 TPS yang ada di empat UPT, 10 bank sampah diantaranya berfungsi sebagai tempat transaksi sampah. Dengan adanya kegiatan bank sampah harapannya dapat menyadarkan masyarakat terkait kebersihan lingkungan dengan cara pengelolaan sampah. Namun, pada kenyataannya, kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah belum dapat berjalan baik karena partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Permasalahan partisipasi masyarakat didukung oleh penelitian Kiki Oktaviana (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat belum maksimal karena kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Semarang masih kurang yang dibuktikan dengan tingginya angka pembakaran sampah mencapai 26%. Sedangkan, terdapat pula sampah yang tidak terkelola dengan baik atau dibuang sembarangan mencapai mencapai 22,7%. Sampah tersebut dibuang pada kawasan kawasan pemukiman, pekarangan, sungai, tepi jalan, dan sebagainya. Permasalahan partisipasi masyarakat juga didukung dengan penelitian Trio Saputra (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang kurang memahami apa itu Bank Sampah dan manfaat Bank Sampah sampai dengan fasilitas yang kurang memadai sehingga Bank Sampah tidak terbentuk. Partisipasi masyarakat yang kurang karena belum memahami dikarenakan kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat. Dengan begitu partisipasi masyarakat atau nasabah Bank Sampah tidak bertambah.

Salah satu bank sampah yang aktif dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah Bank Sampah Ngudi Lestari. Bank Sampah Ngudi Lestari dibentuk dengan tujuan menyadarkan masyarakat terkait kebersihan lingkungan



dengan cara pengelolaan sampah. Namun, Bank Sampah Ngudi Lestari belum dapat mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPS secara maksimal. Permasalahan pertama yakni penurunan nasabah yang aktif untuk menyetorkan sampah ke bank sampah. Saat setelah pandemi Covid-19 terjadi tepatnya pada tahun 2022, jumlah nasabah bank sampah Ngudi Lestari menurun. Jumlah nasabah pada awal dibentuknya bank sampah yakni sebanyak 317 orang pada tahun 2019, jumlah tersebut menurun menjadi 217 pada tahun 2022. Nasabah bank sampah didominasi oleh warga RW 3, 7 dan 8. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan Tinjomoyo sebanyak 10.907 jiwa, maka baru sekitar 1,98% masyarakat Kelurahan Tinjomoyo yang menjadi nasabah bank sampah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di RW 8 di mana RW 8 merupakan lokasi Bank Sampah Ngudi Lestari yang berjumlah kurang lebih 1.350 jiwa, maka baru sekitar 16,07% dari warga RW 8 Kelurahan Tinjomoyo yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Setelah pandemi berakhir, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah Ngudi Lestari tidak seperti pada awal dibentuknya bank sampah Ngudi Lestari.

Kedua, Hasil penelitian lain oleh Ilham Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa tahap partisipasi yang belum sepenuhnya terbuka. Partisipasi masyarakat terutama dalam hal perencanaan pengelolaan sampah selama ini hanya melibatkan partisipasi masyarakat pada tingkat RT dan RW, sedangkan untuk perencanaan tingkat kelurahan hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat saja.

Hasil penelitian lain oleh Ilham Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa belum adanya sistem evaluasi yang jelas. Sistem evaluasi belum jelas karena

laporan informasi yang diberikan kepada masyarakat selama proses pelaksanaan bank sampah kurang terbuka. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1980) pada tahap evaluasi dimana tahap evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya baik oleh pemerintah, pengurus bank sampah, serta masyarakat itu sendiri. Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program. Jika tahap evaluasi pada Bank Sampah Ngudi Lestari belum jelas karena kurang terbukanya laporan informasi kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari belum maksimal karena tahap evaluasi sendiri dianggap penting untuk memperoleh tanggapan atau masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Ngudi Lestari.

Hasil penelitian lain oleh Ilham Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa kesadaran potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengelola sampah belum maksimal. Jika kesadaran masyarakat terkait potensi yang dimiliki untuk mengelola sampah belum maksimal, maka akan sulit mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan bank sampah, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Ketua bank sampah Ngudi Lestari telah berusaha untuk mengarahkan partisipasi masyarakat, namun usaha tersebut belum sepenuhnya mendorong pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo masih rendah, sehingga permasalahan partisipasi masyarakat

dalam program bank Sampah Ngudi Lestari penting diteliti untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bank Sampah Ngudi Lestari.

Partisipasi masyarakat sendiri merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan tujuan SDG's ke-12 Jawa Tengah yakni penanganan limbah industri dan rumah tangga, salah satunya melalui bank sampah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Ngudi Lestari juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang penting karena sampah merupakan permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga membutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Tinjomoyo dalam pengelolaan sampah di bank sampah Ngudi Lestari. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terlibat terkait partisipasi serta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu misi Kelurahan Tinjomoyo adalah “Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan”. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tinjomoyo melalui program bank sampah Ngudi Lestari. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam melaksanakan pengelolaan bank sampah tersebut, diantaranya:

1. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penghasil sampah terbesar di Indonesia.
2. Timbulan sampah di Kota Semarang terus bertambah setiap tahunnya.
3. Keadaan TPA Jatibarang Kota Semarang mengalami *overload* dalam menampung sampah.
4. Bank sampah Ngudi Lestari dibentuk dengan tujuan mengatasi permasalahan sampah, namun partisipasi masyarakat diduga belum optimal, karena:
  - a. Terjadi penurunan nasabah yang aktif untuk melakukan penyetoran sampah ke bank sampah terutama setelah pandemi.
  - b. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Manajemen dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang” oleh Ilham Wicaksono (2020) menunjukkan beberapa permasalahan, yakni:
    - Tahap partisipasi yang belum sepenuhnya terbuka
    - Belum adanya sistem evaluasi yang jelas.

- Penyadaran potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengelola sampah belum maksimal.

### 1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah disebutkan di atas serta pertanyaan penelitian terkait bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Tinjomoyo dalam mengelola sampah di bank sampah Ngudi Lestari, sehingga rumusan masalah yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang Administrasi Publik, sehingga memberikan strategi dalam pelaksanaan dan pengembangan terkait dengan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kebutuhan penelitian di masa depan dan perkembangan bidang pengetahuan.

### 2) Manfaat Praktis

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi Peneliti

Mampu memperdalam ilmu serta pengalaman di bidang akademis serta peneliti dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam hal keterlibatan masyarakat Kelurahan Tinjomoyo dalam mengelola sampah di bank sampah Ngudi Lestari.

#### b. Bagi Pemerintah

Menjadi informasi dan alat evaluasi dalam merumuskan suatu kebijakan terkait penanganan sampah melalui bank sampah serta pemilihan alternatif kebijakan dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi saat ini hingga masa depan.

c. Bagi Lembaga

Menjadi informasi sekaligus alat evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui bank sampah agar dapat berjalan lebih optimal melalui partisipasi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Menjadi pengetahuan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji berfokus pada penelitian yang relevan dengan penelitian tentang partisipasi masyarakat dan sampah.

Kiki Oktaviana dalam artikelnya membahas terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang. Metode Penelitian dilakukan melalui deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah mencapai tingkat yang memadai, namun pada tahap implementasi, pemanfaatan hasil, dan evaluasi masih belum optimal. Partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolis (tokenism). Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat melibatkan pengetahuan, dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, keberadaan Sumber Daya Manusia bank sampah yang kompeten, serta insentif yang diberikan. Di sisi lain, pekerjaan dan keterbatasan sarana prasarana menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat. (Oktaviana et al., 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Windi Setyo Prayitno dkk membahas terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bengetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan metode pengelolaan sampah yang bersifat tradisional. Ini berarti bahwa fokus masyarakat terletak pada tindakan membuang atau mendistribusikan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah pada setiap tahapannya, termasuk perencanaan, pembuangan, pendistribusian, dan gotong royong dalam membersihkan lingkungan (Purwanto, 2009).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Trio Saputra dkk terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. Metode yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif. Studi menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru belum mencapai status sebagai kota bersih tanpa sampah karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah (Saputra et al., 2022).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Istanto menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Wargi Manglayang RW.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang tercermin melalui empat



dimensi partisipasi. Dimensi Pengaruh termanifestasi melalui keikutsertaan perwakilan anggota dalam rapat rutin. Dimensi Inklusivitas tercermin dari keterbukaan Bank Sampah Wangi Manglayang terhadap partisipasi masyarakat yang ingin bergabung. Dimensi Komunikasi terlihat dalam pola komunikasi yang dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi WhatsApp. Dimensi Kapasitas tercermin melalui peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan keahlian dan keinginan mereka, serta pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya (Istanto et al., 2021).

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmi Febrianti dkk menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kategori sedang mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pelaksanaannya belum mencapai tingkat maksimal. Partisipasi tersebut melibatkan aktivitas seperti bergotong-royong, dengan pengangkutan sampah dilakukan dua kali seminggu pada pagi dan siang hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi ini antara lain adalah kurangnya kepedulian karakter warga dan jarak yang jauh dari lokasi Bank Sampah (Febrianti et al., 2022).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ayyasy Nabiilah menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Melalui Program Bank Sampah Sekar Wangi di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Studi ini menunjukkan bahwa indikator partisipasi

masyarakat, seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi harta benda, dan partisipasi sosial, sudah berjalan dengan baik. Namun, partisipasi tenaga dan partisipasi kemahiran serta keterampilan masih belum berjalan dengan optimal. Faktor pendorong partisipasi masyarakat selama program berjalan melibatkan kemauan masyarakat untuk berubah, dukungan pengurus lingkungan, serta peran aktif dari pemerintah yang terus mengawal berjalannya program. Kendala yang dihadapi selama program berjalan termasuk karakter warga yang tidak peduli, kurangnya kemauan untuk berpartisipasi, kurangnya konsekuensi, dan lokasi bank sampah yang jauh dari rumah (Nabiilah, 2021).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Bagas Putra Driyantama menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang (Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah). Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa kelompok Swadaya dan Pemborosan perbankan di Kecamatan Genuk telah aktif terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti mengurangi jumlah sampah dan melakukan pemilahan dari sumber sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mencapai tingkat yang memuaskan, terutama dalam pembuangan limbah dari pengelolaan limbah rumah tangga dengan mendirikan bank sampah. Ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPS dan memanfaatkan daur ulang sampah, sehingga memberikan nilai ekonomi yang tinggi (Turtiantoro & Driyantama, 2020).

Penelitian lain dilakukan oleh A Brotosusilo *et al* menganalisis tentang Tingkat Partisipasi Individu Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Persampahan yang Efektif. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk Jakarta dipengaruhi oleh 1) jumlah keterlibatan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan, 2) tingkat pendidikan, dan 3) pengeluaran per kapita (Brotosusilo et al., 2020).

Penelitian yang sama dilakukan oleh Ndidzulafhi Innocent Sinthumule and Sinqobile Helen Mkumbuzi tentang Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah Padat Berbasis Masyarakat di Nkulumane Suburb, Bulawayo, Zimbabwe. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Studi ini menunjukkan bahwa CBSWM belum berhasil mengubah perilaku warga membuang sampah. Ditemukan juga bahwa organisasi berbasis masyarakat (CBO) tidak melakukan upaya menerapkan pengelolaan alternatif daur ulang dan pengomposan sampah. (Sinthumule & Mkumbuzi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Shiyong Chen and Nan Liu tentang Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan Ekologis Pemerintah Berdasarkan Perspektif Penelitian Target Karbon Ganda. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi warga sulit ditentukan, yang secara serius menghambat partisipasi warga, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam tata kelola lingkungan ekologi untuk meningkatkan mekanisme partisipasi warga dalam tata kelola lingkungan ekologi pedesaan negara (Chen & Liu, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ilham Wicaksono menganalisis tentang Manajemen dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah 'Ngudi Lestari' Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo sudah berjalan cukup baik, meskipun masih belum mencapai tingkat maksimal. Faktor-faktor yang mendukungnya meliputi: sikap terbuka dari masyarakat, adanya pelatihan untuk para pengelola, jelasnya pengarahan, terdapat sarpras atau fasilitas yang mendukung, komunikasi yang dilakukan secara dua arah, dan kepemimpinan yang berintegritas. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi: masyarakat terkadang lupa terkait kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah, usia lanjut dari pengelola, kemampuan mengoperasikan teknologi masih kurang, pola pikir yang masih kuno, data yang tidak selalu terupdate, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka (Ilham & Hardi, 2020).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Bianca Alma Hafizha menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lerep Ungaran Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari tahapan pelaksanaan dan manfaatnya, partisipasi warga dalam pengembangan Desa Wisata Lelepu sudah aktif, namun secara keseluruhan masih belum efektif. Sementara itu, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi pengetahuan dan keterampilan, aspirasi pribadi, mata pencaharian dan tingkat pendidikan, namun bukan gender. Ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi seperti peran pemangku kepentingan dan media.(Hafizha et al., 2019).

Penelitian lain dilakukan oleh Vierona Situmeang menganalisis tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dilaksanakan dengan sangat sukses. Dukungan anggaran, pelatihan dan bantuan dari Pegadaian dan Badan Lingkungan Hidup mendukung implementasi kebijakan ini. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menghambat pencapaian tujuan secara optimal. (Situmeang et al., n.d.).

Penelitian serupa dilakukan oleh Ayu Wastiti menganalisis tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat di Kecamatan Rejomulyo adalah keinginan kuat masyarakat untuk berkontribusi dalam Program Kotaku Masyarakat dengan berpartisipasi dalam perencanaan, interaksi, dan menyatakan minatnya dalam mendukung hasil pembangunan. Namun, hambatan utama untuk berpartisipasi adalah kondisi ekonomi seperti lapangan kerja dan pendapatan. Situasi ekonomi ini menimbulkan hambatan karena masyarakat harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan membatasi jumlah waktu mereka untuk berpartisipasi. Selain itu, pendapatan yang rendah membuat sulit untuk berkontribusi pada program Kotaku (Wastiti et al., 2020).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kiki Oktaviana, dkk (2022)	Mendesripsikan partisipasi masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pada bank sampah Apik Amanah.	Arnstein (dalam Muluk, 2007) mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga tingkatan, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah mencapai tingkat yang memadai, namun pada tahap implementasi, pemanfaatan hasil, dan evaluasi masih belum optimal. Partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolis ( <i>tokenism</i> ). Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat melibatkan pengetahuan, dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) bank sampah yang kompeten, serta insentif yang diberikan. Di sisi lain, pekerjaan dan keterbatasan sarana prasarana menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui penetapan regulasi, himbauan melalui Surat Edaran (SE) Bupati, kampanye 3R, ajakan oleh pengurus bank sampah, dan kegiatan edukasi melalui program sekolah adiwiyata serta sosialisasi.

2.	M. Windi Setyo Prayitno, dkk (2020)	Menganalisis cara masyarakat mengelola sampah sehari-hari, kegiatan, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang baik dan efisien sehingga mampu mengeksplorasi sisi ekonomi dari pengelolaan sampah Desa Bangetayu Wetan.	Partisipasi menurut Mikkelsen (1999: 64) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi sebagai kontribusi sukarela;</li> <li>2. Partisipasi sebagai "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat;</li> <li>3. Partisipasi sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat;</li> <li>4. Partisipasi sebagai suatu proses yang aktif;</li> <li>5. Partisipasi sebagai pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang</li> </ol>	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan metode pengelolaan sampah yang bersifat tradisional. Ini berarti bahwa fokus masyarakat terletak pada tindakan membuang atau mendistribusikan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah pada setiap tahapannya, termasuk perencanaan, pembuangan, pendistribusian, dan gotong royong dalam membersihkan lingkungan.
----	-------------------------------------	---	--	-----------------------	---

3.	Trio Saputra, dkk (2022)	Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru.	Partisipasi menurut T. Ndraha dapat dibagi ke dalam empat tahap: 1. Partisipasi dalam Pembentukan Keputusan. 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan. 3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil. 4. Partisipasi dalam Evaluasi.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru belum mencapai status sebagai kota bersih tanpa sampah karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
4.	Dwi Istanto, dkk (2021)	Menggambarkan partisipasi masyarakat mengacu pada empat dimensi partisipasi yang dijelaskan oleh Mandy Wilson dan Pete Wilde.	Mandy Wilson dan Pete Wilde membagi partisipasi ke dalam empat dimensi yaitu: dimensi pengaruh, dimensi inklusivitas, dimensi komunikasi, dan dimensi kapasitas.	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah Wargi Manglayang tercermin melalui empat dimensi partisipasi. Dimensi Pengaruh termanifestasi melalui keikutsertaan perwakilan anggota dalam rapat rutin. Dimensi Inklusivitas tercermin dari keterbukaan Bank Sampah Wargi Manglayang terhadap partisipasi masyarakat yang ingin bergabung. Dimensi Komunikasi terlihat dalam pola komunikasi yang dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi WhatsApp. Dimensi



					Kapasitas tercermin melalui peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan keahlian dan keinginan mereka, serta melalui pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya.
5.	Fahmi Febrianti, dkk (2022)	Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.	Menurut Santosa (dalam Sulistiyorini, dkk., 2015), partisipasi memiliki tiga unsur, yaitu: 1. adanya rasa tanggung jawab. 2. kesediaan memberi sumbangan untuk mencapai tujuan. 3. ketersediaan kelompok di dalam kelompok.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kategori sedang mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pelaksanaannya belum mencapai tingkat maksimal. Partisipasi tersebut melibatkan aktivitas seperti bergotong-royong, dengan pengangkutan sampah dilakukan dua kali seminggu pada pagi dan siang hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi ini antara lain adalah kurangnya kepedulian karakter warga dan jarak yang jauh dari lokasi Bank Sampah.
6.	Ayyasy Nabiilah (2022)	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, faktor Pendorong dan	Partisipasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk, seperti memberikan kontribusi berupa	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator partisipasi masyarakat, seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi harta benda, dan partisipasi sosial, sudah berjalan dengan baik. Namun, partisipasi tenaga dan partisipasi kemahiran

		penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.	ide, memberikan tenaga, menyumbangkan harta benda, berpartisipasi dengan kemahiran dan keterampilan, serta berinteraksi secara sosial.		serta keterampilan masih belum berjalan dengan optimal. Faktor pendorong partisipasi masyarakat selama program berjalan melibatkan kemauan masyarakat untuk berubah, dukungan pengurus lingkungan, serta peran aktif dari pemerintah yang terus mengawal berjalannya program. Kendala yang dihadapi selama program berjalan termasuk karakter warga yang tidak peduli, kurangnya kemauan untuk berpartisipasi, kurangnya konsekuensi, dan lokasi bank sampah yang jauh dari rumah sosialisasi mengenai bank sampah.
7.	Bagas Putra Driyantama (2020)	Mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan untuk mengidentifikasi apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk.	Santosa (1998:13) menyatakan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai karakteristik mental dan emosi seseorang dalam konteks kelompok, yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan, serta ikut	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok Swadaya dan Pemborosan perbankan di Kecamatan Genuk telah aktif terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti mengurangi jumlah sampah dan melakukan pemilahan dari sumber sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mencapai tingkat yang memuaskan, terutama dalam pembuangan limbah dari pengelolaan limbah rumah tangga dengan mendirikan bank sampah. Ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan memanfaatkan daur ulang sampah,

			bertanggung jawab terhadap usaha yang dilibatkan.		sehingga memberikan nilai ekonomi yang tinggi.
8.	Ilham Wicaksono (2020)	Mengetahui manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberdayaan bank sampah Ngudi Lestari	George R. Terry (1958), seperti yang diutarakannya dalam bukunya " <i>Principles of Management</i> " (Sukarna, 2011: 10), mengidentifikasi empat fungsi dasar manajemen, yakni <i>Planning</i> (Perencanaan), <i>Organizing</i> (Pengorganisasian), <i>Actuating</i> (Pelaksanaan), dan <i>Controlling</i> (Pengawasan).	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo sudah berjalan cukup baik, meskipun masih belum mencapai tingkat maksimal. Faktor-faktor yang mendukungnya meliputi: sikap terbuka dari masyarakat, adanya pelatihan untuk para pengelola, arahan yang jelas, adanya fasilitas yang mendukung, komunikasi dua arah, dan kepemimpinan yang berintegritas. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi: terkadang masyarakat lupa terkait kegiatan pengelolaan bank sampah, usia lanjut dari pengelola, kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi, pola pikir konvensional, data yang tidak selalu terupdate, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka.
9.	A Brotosusilo <i>et al</i>	Tingkat Partisipasi Individu Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang Efektif	Teori partisipasi individu (Gunsilius dan Chaturvedi, 2011)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penduduk Jakarta dipengaruhi oleh 1) frekuensi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 2) tingkat pendidikan, dan 3) pengeluaran per kapita.

10.	Ndidzulafhi Innocent Sinthumule and Sinqobile Helen Mkumbuzi	Partisipasi dalam Pengelolaan Sampah Padat Berbasis Masyarakat di Nkulumane Suburb, Bulawayo, Zimbabwe	Teori Pengelolaan Sampah Padat Berbasis Masyarakat (CBSWM)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBSWM belum berhasil mengubah perilaku warga membuang sampah. Ditemukan juga bahwa organisasi berbasis masyarakat (CBO) tidak melakukan upaya untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah alternatif daur ulang dan pengomposan sampah. Selain itu, kurangnya dana untuk memperbaiki infrastruktur persampahan dan pertikaian antara Environmental Management Agency (EMA) dan Dewan Kota Bulawayo telah menggerogoti prinsip CBSWM. Studi ini diakhiri dengan menyarankan strategi yang dapat meningkatkan CBSWM di negara berkembang.
11.	Shiyong Chen and Nan Liu	Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan Ekologis Pemerintah Berdasarkan Perspektif Penelitian Target Karbon Ganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Partisipasi warga</li> <li>• Teori sinergi</li> <li>• Teori tata kelola</li> <li>• Teori pemangku kepentingan</li> </ul>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga sulit ditentukan, yang secara serius menghambat partisipasi warga, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam tata kelola lingkungan ekologi untuk meningkatkan mekanisme partisipasi warga dalam tata kelola lingkungan ekologi pedesaan negara.

Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai persamaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Oktaviana (2022) yaitu menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang. Namun, perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah belum ada penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah yang mengambil lokus serupa dengan penelitian penulis. Selain itu, perbedaan terletak pada teori partisipasi yang digunakan penulis berbeda dengan teori yang digunakan peneliti sebelumnya, yakni penulis menggunakan teori partisipasi menurut Oakley (1991:9) untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang dibagi ke dalam lima tahapan partisipasi, yakni kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat, peran masyarakat, aksi masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat. Teori Oakley digunakan dalam penelitian ini karena teori ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas tentang partisipasi karena bukan hanya meninjau partisipasi ke dalam bentuk-bentuk seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi, tetapi membahas lebih dalam tentang partisipasi dan masalah yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini juga membahas tentang faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat berdasarkan teori Imron (199). Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang belum pernah dilakukan sebelumnya.

## 1.6.2 Administrasi Publik

Asal-usul istilah administrasi dapat ditemukan dalam bahasa Latin (Yunani), yang terdiri dari dua kata, yakni "*ad*" dan "*ministrate*", yang bermakna "*to serve*" atau "melayani". Dalam konteks Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai kegiatan pelayanan atau pemenuhan. Menurut pandangan A. Dunsire, sebagaimana dikutip oleh Keban (2008:2), administrasi dijelaskan sebagai panduan, pelaksanaan kegiatan, pemerintahan, pengarahannya, analisis, pembuatan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, presentasi, dan penyeimbangan dalam pekerjaan individu atau kelompok untuk menghasilkan jasa dan barang publik dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik.

Pengertian Publik merupakan kesamaan yang ada pada sejumlah orang untuk berpikir, berperasaan, berharap, bersikap, dan bertindak secara benar dan baik dalam nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie, dkk dalam Pasolong, 2011:6). Jefkins (Abdussamad, 2021) mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang atau individu yang berkomunikasi dengan kelompok lain baik secara internal maupun eksternal. Ruslan (dalam Abdussamad, 2021) menegaskan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki seperangkat nilai atau pedoman yang berbeda-beda, dimana masyarakat tersebut terdiri dari kumpulan individu yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari kelompoknya.

Definisi Administrasi Publik yang dijelaskan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) menjadi suatu proses koordinasi dan pengelolaan dengan baik untuk merancang, merealisasikan, serta menjalankan keputusan atau kebijakan publik. Lebih spesifik, administrasi publik diartikan sebagai seni dan ilmu (*art and science*) dalam konteks perubahan permasalahan dan tugas-tugas publik yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi manusia akan semakin kompleks, sehingga permasalahan tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah atau administrator publik secara kompleks juga (Chandler dan Plano dalam

Keban, 2014:8). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa administrasi publik terkait erat dengan kondisi manusia. Berdasarkan teori dari Para Ahli dan diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses yang mewngikutsertakan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, komunitas, dan kelompok pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya dimana semua actor tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

### 1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merujuk pada pola pikir individu atau kelompok. Menurut Thomas S. Kuhn dalam Syafie (2010:26), paradigma diartikan sebagai prinsip atau sudut pandang terhadap pemecahan masalah tertentu yang muncul dalam konteks masyarakat pada suatu periode waktu tertentu. Nicholas Henry menyatakan bahwa ada enam perspektif pakar yang dapat diterapkan pada paradigma ilmu administrasi publik, yang dikenal sebagai enam paradigma administrasi publik. Berikut adalah penjelasan mengenai paradigma-paradigma tersebut.

a) Paradigma I (1900-1926)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi dan dikotomi politik. Dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration*", Goodnow menyatakan adanya pemisahan antara administrasi dan politik. Politik difokuskan pada pembuatan kebijakan atau ekspresi keinginan masyarakat melalui badan legislatif, sementara administrasi berfokus pada badan eksekutif yang melaksanakan kebijakan. Paradigma ini menjelaskan bahwa ilmu administrasi negara berorientasi pada permasalahan kepegawaian, penyusunan anggaran pada pemerintah, dan isu organisasi. Di sisi lain, orientasi ilmu politik terletak pada isu politik, pemerintahan, dan kebijakan.

b) Paradigma II (1927-1937)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip yang ada dalam administrasi. Paradigma ini menekankan pentingnya fokus pada "prinsip-prinsip administrasi" yang mana berbagai bentuk organisasi secara umum dapat menerapkan di lingkungan sosial budayanya. Lokus administrasi negara tidak dianggap sebagai isu utama dalam paradigma ini. Gulick dan Urwick berpendapat mengenai prinsip-prinsip memiliki peran yang sangat signifikan dalam administrasi sebagai ilmu. Prinsip administrasi ini dapat juga disebut dengan istilah POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*).



c) Paradigma III (1950-1970)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma di mana administrasi negara dianggap sebagai cabang dari ilmu politik. Muncul kritik terhadap sebelum paradigma ini, di mana kemungkinan pemisahan antara politik dan administrasi ditanyakan oleh Morstein-Mark. Herbert Simon mengkritik terkait prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berlaku secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada terdapat upaya pada paradigma ini untuk mendefinisikan hubungan secara konsep antara ilmu politik dan administrasi negara. Meskipun fokus paradigma ini belum jelas, tetapi paradigma ini berfokus pada birokrasi memiliki fokus pada birokrasi, meskipun fokusnya masih belum terlalu jelas karena masih terdapat kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi.

d) Paradigma IV (1956-1970)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi publik sebagai cabang dari ilmu administrasi. Pada paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang muncul dalam ketiga paradigma sebelumnya kemudian dikembangkan secara natural dan menyeluruh. Paradigma ini mengutamakan fokus tanpa menentukan lokus spesifiknya. Fokusnya terpusat pada analisis sistem dan manajemen, riset operasi, teknologi moderan, dan perilaku organisasi. Paradigma ini berkembang dalam dua arah, yaitu orientasi kebijakam publik dan orientasi ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi.

e) Paradigma V (1956-1970)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi publik dalam konteks administrasi publik itu sendiri. Paradigma ini mencerminkan administrasi negara yang berkembang menjadi ilmu administrasi publik. Paradigma ini difokuskan pada teori kebijakan publik serta teori manajemen dan organisasi dan manajemen. Sementara itu, kepentingan publik dan permasalahan menjadi lokus dalam paradigma ini.

f) Paradigma VI (1990-Sekarang)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma tata kelola (*governance*) yang muncul pada 1990 akhir. *Governance*, menurut Tamagoya (Ikeanyibe, Ezre Ori, & Okoye, 2017), mengungkapkan bahwa pemimpin politik memiliki otoritas agar rakyat menjadi sejahtera. Proses ini melibatkan sektor-sektor masyarakat yang memiliki kekuasaan dan berpartisipasi dalam pengumuman kebijakan publik, yang berdampak pada manusia dan institusi. Paradigma *governance* membagi *governance* menjadi beberapa jenis, seperti *good governance*, *network governance*, dan *collaborative governance*.

#### 1.6.4 Manajemen Publik

Menurut KBBI, manajemen publik adalah guna sumber dayayang efektif, baik sumber daya manusia maupun alam untuk mencapai target di tingkat perusahaan ataupun organisasi. Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) manajemen publik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi maupun pemanfaatan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan suatu organisasi. Untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di suatu negara, maka sistem manajemen publik menyediakan berbagai layanan publik dan barang publik yang dapat diakses oleh warga negara. Subsistem lainnya, seperti sistem ekonomi,

hukum, politik, sosial, dan agama, berperan dalam melaksanakan sistem administrasi publik pada suatu negara.

Laurence Lynn (1996) meninjau kembali kemungkinan yang terdiri dari tiga pandangan terhadap manajemen publik, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). Lynn menjelaskan maksud dari seni dalam manajemen publik ialah kegiatan kreatif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tidak dapat dipelajari secara 'dihitung'. Dengan kata lain, manajemen publik dianggap sebagai kegiatan yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dan bergantung pada situasi dan kondisi di mana hal tersebut dilakukan.

Ilmu dalam manajemen didefinisikan sebagai manajemen publik membutuhkan analisis secara terstruktur yang dilakukan melalui penjelasan dan penafsiran. Sementara itu, profesi dalam manajemen didefinisikan dedikasi yang dilakukan individu atau kelompok terhadap ilmu manajemen publik. Ilmu tersebut kemudian digabungkan menjadi satu terminologi, yaitu "*public administration & management*," menurut Komite Manajemen Administratif President Franklin Delano Roosevelt. Namun, istilah tersebut tidak diterima dengan baik oleh kalangan administrasi maupun manajemen publik (Lynn, 2006, h.8).

### 1.6.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Definisi partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai kontribusi individu atau kelompok pada suatu masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan kegiatan mengambil bagian untuk mendapatkan suatu manfaat Bornby (dalam Ajib Mahendra, 2022:30). Partisipasi merupakan individu yang ikut serta pada suatu kelompok sosial untuk dapat menjadi bagian kegiatan yang dilakukan masyarakat diluar dari profesi yang ia lakukan Theodorson (dalam Ajib Mahendra, 2022:30).

Oakley (1991:9) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan lima indikator, yakni:

#### 1) Kontribusi masyarakat

Kontribusi dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat melalui pemikiran, dana, tenaga, dan fasilitas untuk mendukung program atau kegiatan yang dijalankan oleh pihak tertentu.

#### 2) Pengorganisasian masyarakat

Pengorganisasian masyarakat ialah proses pembagian kerja atau struktur organisasi dengan memperhatikan tujuan, sumber daya, dan lingkungan sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### 3) Peran masyarakat

Peran masyarakat merujuk pada kontribusi dan keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, atau kegiatan lainnya

melibatkan masyarakat. Hal ini mencakup kontribusi dalam bentuk pemikiran, aksi, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama serta memajukan kesejahteraan bersama.

#### 4) Aksi masyarakat

Aksi masyarakat mencakup tindakan nyata atau kontribusi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melibatkan diri dalam berbagai kegiatan atau proses yang berdampak kehidupan mereka. Aksi masyarakat merupakan bentuk konkret dari partisipasi yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat berupa peran aktif dalam pengambilan keputusan, implementasi program, atau berkontribusi secara positif terhadap perkembangan masyarakat.

#### 5) Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat merujuk pada perilaku melaksanakan suatu hal secara dengan tekun dan sanggup menanggung kemungkinan risiko yang terjadi ketikas terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, atau kegiatan lainnya yang mendorong atau menghambat kehidupan masyarakat. Ini mencakup kesadaran akan kepentingan bersama, kontribusi positif, dan dukungan terhadap upaya bersama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan partisipasi masyarakat yang dikelompokkan menjadi empat tahap, yakni:

##### 1) Tahap Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Tahap ini berfokus pada menciptakan ide, merumuskan dan menentukan rencana yang akan diputuskan. Keputusan dibagi menjadi tiga bentuk, yakni keputusan awal (*initial decision*), keputusan yang sedang berlangsung (*ongoing decision*), dan keputusan operasional (*operational decision*).

##### 2) Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap ini membagi partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara utama, yakni partisipasi sumber daya (uang, barang, informasi, tenaga), partisipasi koordinasi dan administrasi (keikutsertaan sebagai sukarelawan dalam mengoordinasi kegiatan), dan partisipasi pada kegiatan pendaftaran program.

### 3) Tahap Pemanfaatan Hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil bersifat pasif, namun tidak menutup kemungkinan terdapat risiko bahaya yang akan diperoleh. Tahap ini membagi manfaat menjadi tiga bentuk yang dapat diperoleh masyarakat, yakni materi (pendapatan, aset), sosial (fasilitas publik, pelayanan publik), dan pribadi (harga diri).

### 4) Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap ini membagi evaluasi partisipasi menjadi dua bentuk, yakni evaluasi langsung (kegiatan politik) dan evaluasi tidak (menggunakan media tertentu untuk berkomunikasi).

Arnstein (dalam Kiki, 2022:37) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yakni:

#### 1) *Non-Participation*

*Non-Participation* menjadi tingkatan terendah karena partisipasi masyarakat dalam tingkat ini bukan untuk mendukung masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan program melainkan hanya sebagai sarana penguasa untuk mendidik dan menyenangkan masyarakat. Terjadi penyimpangan informasi pada tingkat ini yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai keterangan yang terbuka dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, partisipasi masyarakat yang diberikan bukan berupa aspirasi yang nyata dari masyarakat. Pada tingkat *Non-Participation* ini terdiri dari dua anak tangga, yakni manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*).

#### 2) *Tokenism*

*Tokenism* menjadi tingkatan tengah karena adanya interaksi publik yang mana meskipun masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan, namun pendapat masyarakat berhak untuk didengar. Pada tingkat *Tokenism* ini terdiri dari tiga anak tangga, yakni pemberitahuan (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan penentraman (*placation*).

### 3) *Citizen Power*

*Citizen Power* menjadi tingkatan tertinggi karena terdapat tiga anak tangga yang memiliki kekuasaan penuh pada tingkat partisipasi, yakni kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol masyarakat (*citizen control*).

#### 1.6.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor Pendorong dan Penghambat partisipasi masyarakat menurut menurut (Imron:2005) dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal partisipasi masyarakat, yakni:

##### 1) Kesempatan

Kesempatan merupakan kondisi seseorang yang sadar terhadap lingkungannya bahwa mereka memiliki peluang untuk berpartisipasi.

##### 2) Kemampuan

Kemampuan merupakan kondisi meyakini diri sendiri bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kemampuan bisa dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi pendorong maupun penghambat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

##### 3) Kemauan

Kemauan atau keinginan merupakan kondisi yang mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi hingga memberikan manfaat yang akan diterima jika mengikuti kegiatan tersebut.

##### 4) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat baik rendah maupun tinggi memberikan dampak signifikan pada pola pikir dan tindakan individu. Hal ini tentunya dapat mendorong maupun menghambat tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan.



#### 5) Pekerjaan

Pekerjaan menjadi mata pencaharian masyarakat yang beragam dapat mendorong maupun menghambat proses partisipasi mereka karena setiap pekerjaan membutuhkan keterampilan dan waktu yang berbeda.

#### 6) Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin wanita dan pria menciptakan keahlian yang unik pada masing-masing bidang, dan hal ini dapat tercermin dalam proses partisipasi mereka.

Faktor eksternal partisipasi masyarakat menurut (Imron:2005), yakni:

##### 1) Stakeholder

Stakeholder memiliki dampak signifikan pada suatu kegiatan, terutama dalam mengatur jalannya partisipasi masyarakat. Stakeholder merupakan kelompok yang terlibat dan memiliki otoritas yang lebih besar dalam suatu kegiatan, sekaligus menjadi tempat untuk menghimpun aspirasi dan menyediakan SDA.

##### 2) Media Massa

Media massa berperan sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi beragam individu. Oleh karena itu, keberadaan media massa memiliki potensi untuk mendorong maupun menghambat tingkat partisipasi masyarakat dan pandangan mereka terkait suatu kegiatan.

Dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (Imron:2005) yang terdiri dari faktor internal (kesempatan, kemauan, kemampuan, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin) dan faktor eksternal (stakeholder dan media massa). Faktor tersebut dianalisis berdasarkan gejala yang ada di lapangan kemudian dikelompokkan mana saja gejala yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat.

Tabel 1. 2 Teori Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor internal	Faktor eksternal	Teori yang dipilih
1. Kesempatan 2. Kemampuan 3. Kemauan 4. Pendidikan 5. Pekerjaan 6. Jenis kelamin	1. Stakeholder 2. Media massa	1. Faktor internal individu (kesempatan, kemampuan, kemauan, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin) 2. Faktor eksternal (stakeholder dan media massa)

Berdasarkan pendapat Para Ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bank sampah dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal meliputi kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah, kemauan masyarakat dalam mengelola sampah, pendidikan, pekerjaan dan jenis kelamin.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi stakeholder yang terlibat dan media massa yang dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

### 1.6.7 Sampah

Sampah merupakan limbah padat yang mengandung zat organik dan dianggap tidak dapat digunakan kembali, sehingga perlu dikelola untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan. Hal ini juga merupakan upaya pelestarian investasi pembangunan (Subekti, 2009, dalam Alfiandra, 2009). Sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan (Sucipto, 2012). Dalam konteks urban, sampah merupakan sisa buangan atau limbah yang bersifat padat atau setengah padat, dihasilkan dari berbagai kegiatan kehidupan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan (Suryani, 2014). Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik diperlukan agar tidak memberikan dampak negatif pada kehidupan, dan dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dimanfaatkan, tidak disukai, dan harus dibuang dengan baik (Azwar, 1990).

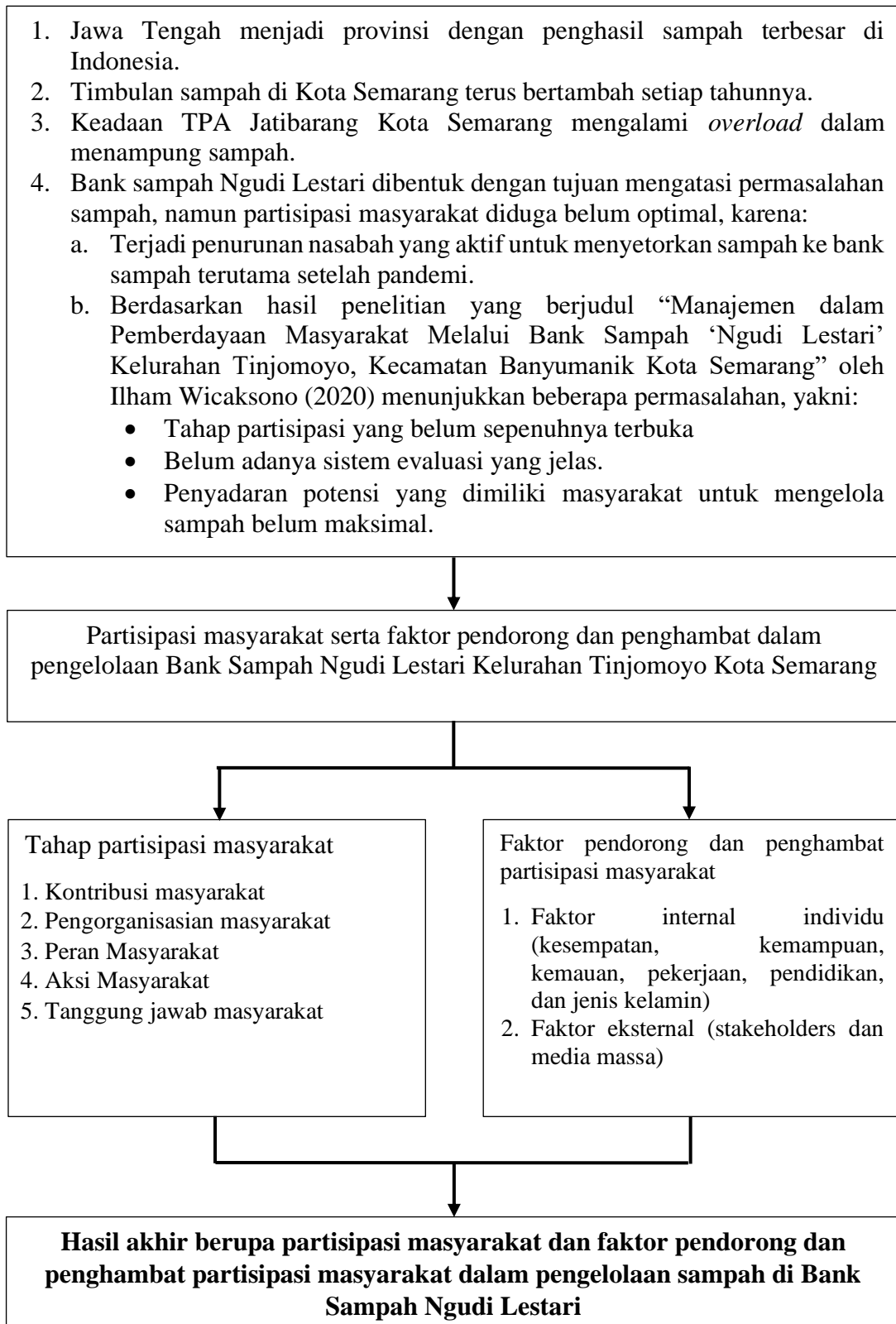
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah didasarkan pada beberapa asas, seperti asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Tujuan dari pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis (Putra, 2017).

### 1.6.8 Bank Sampah

Bank sampah dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara bersama dengan mengikutsertakan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat (Unilever, 2014). Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pemilahan, penampungan, serta pendistribusian sampah yang menguntungkan sehingga masyarakat akan mendapat keuntungan finansial dari kegiatan menabung di bank sampah. Nugraha, dkk (dalam Kiki, 2022:35) berpendapat bahwa pengelolaan sampah memposisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengurangi timbulan sampah yang akan meningkat karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah mendefinisikan bahwa bank sampah menjadi fasilitas untuk mengelola sampah terutama sampah rumah tangga dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta. Bank sampah tidak hanya membuat lingkungan menjadi bersih, tetapi juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan serta memberikan nilai ekonomis pada sampah. Bank sampah, dapat mengubah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Masyarakat dapat menukarkan sampah rumah tangga mereka dengan imbalan berupa uang, yang kemudian dikumpulkan dalam rekening bank sampah. Selain uang, imbalan yang diterima juga dapat berupa bahan makanan pokok.

## 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



## 1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo berdasarkan pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi merupakan proses dimana masyarakat ikut berkontribusi dalam suatu kegiatan. Fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah dibagi menjadi dua sebagai berikut.

### 1.8.1 Mekanisme Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari

Pengelolaan sampah dianalisis berdasarkan pada gejala-gejala yang ada di lapangan berdasarkan teori Oakley (1991:9), antara lain:

- 1) Kontribusi masyarakat, gejala yang diamati berupa: partisipasi dalam kontribusi pemikiran, partisipasi dalam kontribusi dana, partisipasi dalam kontribusi tenaga, dan partisipasi kontribusi fasilitas.
- 2) Pengorganisasian masyarakat, gejala yang diamati berupa: pengorganisasian dari sisi masyarakat dan pengorganisasian dari sisi petugas bank sampah.
- 3) Peran masyarakat, gejala yang diamati berupa: partisipasi peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sampah, partisipasi peran masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah, dan partisipasi peran masyarakat dalam proses evaluasi pengelolaan sampah.
- 4) Aksi masyarakat, gejala yang diamati berupa: partisipasi dalam pemilihan sampah, partisipasi dalam pengumpulan sampah ke bank sampah, partisipasi dalam penimbangan sampah, partisipasi dalam pencatatan, partisipasi dalam tabungan sampah, partisipasi dalam pembagian hasil penjualan sampah, partisipasi pendaurulangan sampah.

5) Tanggung jawab masyarakat, gejala yang diamati berupa: kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan konsistensi atau tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

### 1.8.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dianalisis berdasarkan pada gejala-gejala yang ada di lapangan berdasarkan teori (Imron:2005) membagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, antara lain:

- 1) Faktor internal, gejala yang diamati berupa: kesempatan, kemampuan, dan kemauan masyarakat, pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin.
- 2) Faktor eksternal, gejala yang diamati berupa: stakeholders dan media massa yang terlibat dalam mengelola sampah.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari	Kontribusi masyarakat	Partisipasi dalam kontribusi pemikiran
		Partisipasi dalam kontribusi dana
		Partisipasi dalam kontribusi tenaga
		Partisipasi dalam kontribusi fasilitas
	Pengorganisasian masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian
		Partisipasi petugas dalam pengorganisasian masyarakat
	Peran masyarakat	Partisipasi peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sampah
		Partisipasi

		peran masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah	
		Partisipasi peran masyarakat dalam proses evaluasi pengelolaan sampah	
	Aksi masyarakat	Partisipasi dalam pemilihan sampah	
		Partisipasi dalam pengumpulan sampah	
		Partisipasi dalam penimbangan sampah	
		Partisipasi dalam pencatatan sampah	
		Partisipasi dalam tabungan sampah	
		Partisipasi dalam pembagian hasil	
		Partisipasi dalam pendaurulangan sampah	
	Tanggung jawab masyarakat	Kesadaran dalam berpartisipasi	
Konsistensi dalam berpartisipasi			
Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat	Faktor internal	Kesempatan	
		Kemampuan	
		Kemauan	
		Pekerjaan	
		Pendidikan	
		Jenis kelamin	
	Faktor eksternal	Stakeholders	
		Media massa	

## 1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Ngudi Lestari yang diidentifikasi berdasarkan teori Oakley (1991:9) dikategorikan menjadi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat, peran masyarakat, aksi masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat. Partisipasi masyarakat tentunya



dipengaruhi beberapa faktor yang mana dalam hal ini menggunakan teori Imron (2005). Permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sampah hingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara mengurangi dan menangani sampah melalui bank sampah.

Pengelolaan sampah saat ini menjadi isu penting dalam rangka menyikapi permasalahan sampah di Indonesia yang kian meningkat, terutama pada Jawa Tengah yang menjadi provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Kota Semarang menjadi salah satu kota yang menghasilkan sampah karena Kota Semarang menjadi pusat pemerintahan Jawa Tengah, pendidikan, industri, perkantoran, dan sebagainya sehingga banyak penduduk yang bertempat tinggal di Kota Semarang. Semakin banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

Di sisi lain, TPA Jatibarang selaku tempat pembuangan akhir sampah di Kota Semarang dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas. Berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya pengelolaan sampah dapat diwujudkan mulai dari lingkup kecil, yakni pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu bank sampah di Kota Semarang adalah Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Ngudi Lestari diduga masih rendah, terutama saat setelah terjadi pandemi yang mana aktivitas masyarakat kembali normal sehingga sampah yang dihasilkan meningkat dibandingkan sejak pertama kali bank sampah ini dibuka. Sebelumnya terdapat penelitian mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari yang menunjukkan bahwa

partisipasi masyarakat terutama dalam tahap perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terbuka.

## 1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan menyajikan data secara deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan yang bersumber dari manusia serta tindakan pengamatan Bagdan & Taylor (dalam Amanda, 2022). Peneliti memilih metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena karena penelitian ini menjelaskan, mendeskripsikan, dan menggambarkan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam sehingga dapat mengungkap informasi secara lebih teliti. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, pendapat, keterangan maupun konsep tertentu yang dapat menjelaskan persoalan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari.

### 1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus pada kegiatan mengamati manusia dan lingkungannya maupun situasi tertentu (Moleong, 2017:6). Penelitian tipe deskriptif menghimpun data berupa kata-kata, gambar-gambar, dan sebagainya. data-data tersebut diperoleh melalui hasil dokumentasi, observasi, wawancara, dokumen sekunder, dan rekaman wawancara. Melalui tipe penelitian deksriptif, peneliti dapat menjelaskan realitas yang terjadi di lapangan dengan tepat dan sedalam-dalamnya. Penelitian ini menganalisis tentang partisipasi dan faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah Ngudi Lestari.

### 1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kelurahan Tinjomoyo sebagai situs penelitian. Latar belakang peneliti memilih Kelurahan Tinjomoyo sebagai lokasi penelitian karena bank sampah Ngudi Lestari merupakan bank sampah yang dimiliki dan terletak di Kelurahan Tinjomoyo.

### 1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran peneliti untuk memperoleh berbagai informasi terkait topik penelitian. Dengan kata lain, subjek penelitian biasa disebut juga dengan informan yang mana informan tersebut mengetahui dan memahami situasi dan kondisi lokasi penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti untuk memilih informan adalah teknik *purposive*. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk mendapatkan kunci informan terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo yang mana dalam pemilihan informan diperlukan berbagai pertimbangan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam masalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Ngudi Lestari. Pihak-pihak tersebut terdiri dari:

- 1) Pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari, meliputi:
  - a. Ketua bank sampah
  - b. Bendahara bank sampah
- 2) Masyarakat, meliputi:
  - a. Nasabah Bank Sampah Ngudi Lestari
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4. Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)

Tabel 1. 4 Pemilihan Informan

No	Status	Teknik Pemilihan	Jumlah
1.	Ketua bank sampah	<i>Purposive sampling</i>	1
2.	Bendahara bank sampah	<i>Purposive sampling</i>	1
3.	Nasabah bank sampah	<i>Snowball sampling</i>	3
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	<i>Purposive sampling</i>	1
5.	Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)	<i>Purposive sampling</i>	1
Jumlah			7

#### 1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Data Angka

Data angka meliputi jumlah, frekuensi, rata-rata, dan sebagainya.

##### 2) Data Tertulis

Data tertulis meliputi uraian teks yang berasal dari jurnal artikel, undang-undang, buku, dan sebagainya.

##### 3) Data Gambar

Data gambar meliputi gambar, kurva, diagram, dan sebagainya

##### 4) Data Tabel

Data tabel meliputi data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Penelitian ini menggunakan kombinasi keempat data tersebut. Data angka seperti jumlah timbulan sampah, data tertulis seperti penjabaran kondisi dan pengelolaan sampah, data gambar seperti diagram jenis sampah, dan data tabel seperti tabel penelitian terdahulu.

### 1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yakni:

#### 1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan (Nugrahani, 2014). Data primer diperoleh dari informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo. Peneliti juga memperoleh data primer melalui observasi langsung pada lokasi penelitian yaitu Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung di lapangan tetapi data tersebut telah dibuat oleh orang lain (Nugrahani, 2014). Data sekunder berperan sebagai sumber data dalam penelitian bila data tidak tersedia di narasumber. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari salinan perundang-undang terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang, data sampah dari *website* KLHK, berita *online*, artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

### 1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, perlu kecermatan dalam mengumpulkan data karena kegiatan pengumpulan data menentukan keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari:

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan (Sugiyono, 2012). Melalui wawancara akan diperoleh data primer secara langsung dari informan utama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara bebas karena tidak terikat dengan pertanyaan. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap subjek penelitian yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo.

#### 2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan menggunakan panca indra secara langsung tanpa komunikasi terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2012). Melalui observasi akan diperoleh data primer secara langsung dari informan utama. Teknik observasi dibagi menjadi dua, yakni observasi partisipasi (peneliti ikut serta dalam kegiatan yang akan diamati dalam pengumpulan data) dan observasi non-partisipasi (peneliti melakukan pengamatan tanpa ikut serta dalam objek yang diamati). Peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipasi secara terstruktur yang dilakukan di lingkungan Kelurahan Tinjomoyo termasuk Bank Sampah Ngudi Lestari.

#### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian masa lalu secara tertulis, gambar, dan karya tertentu (Sugiyono, 2012:82). Penelitian kualitatif menjadikan dokumentasi sebagai data Pendorong dari wawancara dan observasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini

yakni transkrip wawancara dengan informan, bukti foto bersama informan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Ngudi Lestari.

#### 1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teori interpretasi data menurut Miles dan Huberman (2014) yang membagi menjadi tiga tahapan, yakni:

##### 1) Kondensasi Data

Tahapan kondensasi data terdiri dari penetapan, pengutamaan, penyederhanaan, pengabstraktasikan, serta memodifikasi data yang telah diperoleh dari lapangan. Tahap ini dilakukan selama penelitian berlangsung hingga selesai secara berkesinambungan.

##### 2) Penyajian Data

Tahapan penyajian data dilakukan dengan menghimpun data secara terstruktur menjadi lebih ringkas untuk dapat dianalisis dan diperoleh kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan peneliti memahami penelitian.



### 3) Kesimpulan

Tahapan kesimpulan menjadi tahap akhir dalam kegiatan analisis data kualitatif. Tahap ini dilakukan dengan menguji keabsahan dan kekuatan data yang telah diperoleh, kemudian direduksi dan disajikan secara berkelanjutan untuk menemukan keputusan yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Peneliti menggunakan tahapan reduksi dimana data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi kemudian dicatat dan ditelaah. Kemudian, dilakukan penyaringan kembali data untuk memisahkan yang akan dipakai. Data disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi disesuaikan dengan tujuan untuk diperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

#### 1.9.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dapat diuji dengan memeriksanya melalui triangulasi (Helaluddin dan Wijaya, 2019). Triangulasi dibagi menjadi tiga tahap, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam menentukan kualitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi mencari kebenaran informasi menggunakan berbagai sumber yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Ngudi Lestari memerlukan pengecekan data dari berbagai sumber informasi yang berbeda dengan tujuan memperoleh data yang kredibel. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan informan yang beragam agar data yang dihasilkan berasal dari berbagai sudut pandang. Penulis menggabungkan teknik wawancara dan dokumentasi agar kualitas dan kredibilitas data yang diperoleh dapat terjamin.